

Rabu, 28 April 2021

1. Siap-Siap, Industri Asuransi akan Terapkan PSAK 74 [Bisnis.com](https://bisnis.com) /27-04-2021

Siap-Siap, Industri Asuransi akan Terapkan PSAK 74

Direktur Pengawasan Asuransi OJK Supriyono menjelaskan bahwa PSAK 74, yang merupakan adopsi dari International Financial Accounting Standard (IFRS) 17, akan diterapkan bagi industri asuransi di Indonesia.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

27 April 2021 | 14:53 WIB



Karyawan melintasi logo-logo perusahaan asuransi di Kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta, Selasa (11/02/2020). *Bisnis* - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri asuransi perlu bersiap menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 74. Mekanisme pelaporan itu dinilai dapat meningkatkan transparansi industri sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Direktur Pengawasan Asuransi OJK Supriyono menjelaskan bahwa PSAK 74, yang merupakan adopsi dari International Financial Accounting Standard (IFRS) 17, akan diterapkan bagi industri asuransi di Indonesia. Pedoman itu akan mengubah mekanisme pelaporan keuangan, salah satunya terkait pencatatan premi.

Otoritas menilai bahwa pemberlakuan pedoman itu akan meningkatkan transparansi industri asuransi. Langkah itu menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri yang saat ini menghadapi sejumlah kabar miring dari beberapa kasus gagal bayar.

"Laporan keuangan perusahaan asuransi bisa lebih transparan dibandingkan dengan industri keuangan lain. Tujuan transparansi bisa tercapai dengan pelaporan keuangan dan nonkeuangan bisa lebih baik dan teratur," ujar Supriyono dalam dialog Penerapan GCG di Industri Asuransi yang digelar *Bisnis*, pada Selasa (27/4/2021).

Menurutnya, pelaporan dengan PSAK 74 secara perlahan akan membuat perbedaan dalam operasional perusahaan-perusahaan asuransi. Transparansi itu dinilai akan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) yang baik.

"Manajemen dan auditor eksternal harus memastikan peran pentingnya di sini," ujar Supriyono.

Adapun, sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menjelaskan bahwa pelaku industri asuransi jiwa pada prinsipnya memandang IFRS 17 sebagai hal yang positif sehingga mendukung penuh penerapannya. Kendati demikian, dia mengaku perusahaan asuransi jiwa belum siap menerapkan ketentuan tersebut.

"Mengingat IFRS 17 bukan sesuatu yang mudah implementasinya, bahkan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk sistem teknologi informasi [TI] dan sumber daya manusia [SDM], industri asuransi jiwa belum siap menerapkan IFRS 17 dalam waktu dekat. Kami minta penerapannya diundur ke tahun 2025," ujarnya kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiary Dalimunthe. Menurutnya, asosiasi fokus menginventarisasi potensi masalah-masalah dari penerapan IFRS 17 dan merumuskan solusi pemecahannya.

"Sebelumnya AAUI dan AAJI sudah menyampaikan surat ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia [DSAK IAI] dan OJK berupa usulan agar IFRS 17 diberlakukan tahun 2025 dengan asumsi industri asuransi sudah siap," ujar Dody.

2. Tahun 2020, Astra Life Capai Pertumbuhan Premi dan Tertanggung di Atas Rata-rata Industri
Harianhaluan.com /27-04-2021

Tahun 2020, Astra Life Capai Pertumbuhan Premi dan Tertanggung di Atas Rata-rata Industri

Selasa, 27 April 2021 - 20:30:34 WIB



Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - DARIPT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) berhasil mencatatkan Gross Written Premium (GWP) di tahun 2020 sebesar Rp3,8 triliun atau tumbuh 11% dan jumlah tertanggung yang melampaui angka 2,9 juta atau naik 32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian Astra Life di tahun keenam sejak beroperasi ini berada di atas rata-rata pencapaian industri asuransi jiwa di tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi semua industri tidak terkecuali industri asuransi jiwa dimana berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) secara pendapatan premi industri asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar 5% dari Rp196,7 triliun di kuartal IV 2019 menjadi Rp187,6 triliun di kuartal IV 2020 dan total tertanggung turun 7% dari 68,51 juta menjadi 63,69 juta.

Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi mengungkapkan bahwa dengan segala tantangan yang ada, Astra Life tetap bisa membukukan pencapaian yang positif.

"Secara finansial Astra Life tetap mencatat pertumbuhan premi 11% atau sebesar Rp3,8 Triliun dan mencapai angka tertanggung 2,9 juta. Kami berterima kasih atas kepercayaan nasabah kepada Astra Life selama ini dan kami akan terus berinovasi dan fokus pada komitmen Astra Life untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi nasabah," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Selasa (27/4/2021).

Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan Astra Life atau Life Lovers dalam memberikan kontribusi terbaiknya ditengah keterbatasan yang ada akibat pandemi.

Sepanjang tahun 2020 Astra Life telah membayarkan klaim sebesar Rp504 miliar sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Astra Life untuk selalu hadir memberikan perlindungan bagi nasabah.

Hal ini juga menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan rasio kecukupan modal/Risk Based Capital di angka 454%, jauh diatas batas yang ditentukan oleh OJK yaitu 120%.

Astra Life optimis akan terus mencapai ketinggian baru di tahun-tahun mendatang melalui digitalisasi yang menjadi strategi utama untuk akselerasi pertumbuhan bisnis kedepannya.

Terlebih saat ini Astra Life berada dibawah naungan penuh grup Astra yang juga fokus mengembangkan bisnis nya di era digital.

Astra Life meyakini dengan digital, semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses dan memperoleh produk perlindungan, dan misi perusahaan untuk membawa ketenangan pikiran dan membangun masa depan yang sejahtera ke jutaan masyarakat Indonesia dapat terwujud.

Layanan Digital Astra Life untuk kemudahan Anda, Don't Worry #IGotYourBack. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Reflis

3. AXA Financial perkuat asuransi syariah dengan tambahan fitur wakaf
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) /27-04-2021

AXA Financial perkuat asuransi syariah dengan tambahan fitur wakaf

Selasa, 27 April 2021 / 20:00 WIB



ILUSTRASI. Ilustrasi keuangan single parents. KONTAN/Muradi/2017/05/04

Reporter: **Selvi Mayasari** | Editor: **Tendi Mahadi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. AXA Financial Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terdepan di Indonesia memiliki komitmen jangka panjang untuk meningkatkan lini bisnis syariah dan berkontribusi terhadap peningkatan penetrasi asuransi syariah di Indonesia.

AXA Financial Indonesia melalui produk asuransi syariah kembali memperkuat komitmennya untuk memberikan solusi asuransi jiwa yang bernilai tambah bagi para nasabah dengan manfaat yang dapat digunakan demi kemaslahatan umat.

Cicilia Nina, Direktur AXA Financial Indonesia mengungkapkan, keistimewaan asuransi berbasis syariah seperti prinsip berbagi risiko dan saling tolong menolong serta pengelolaan kontribusi peserta secara adil dan transparan tercermin di dalam produk AXA Financial Indonesia.

"Banyak pihak masih mempunyai pemahaman yang keliru terkait produk asuransi syariah. Pada dasarnya, asuransi syariah tidak bertransaksi dan berinvestasi pada instrumen yang tidak jelas akadnya (gharar), spekulatif dan memiliki potensi merugikan salah satu pihak," ujar Cicilia saat konferensi pers virtual, Selasa (27/4).

Kemudian ia menambahkan, prinsip asuransi syariah berdasar pada hukum Islam, oleh karena itu produk asuransi syariah tidak menginvestasikan dananya dalam bisnis yang mengandung riba (berbunga) dan hal lain yang diharamkan atau dihindari dalam Islam seperti alkohol, rokok, institusi keuangan konvensional dan bisnis lainnya yang masuk kategori non halal.

Lebih lanjut, instrumen pengelolaan dana pada produk asuransi syariah juga dikelola sebaik mungkin. Setiap nasabah asuransi syariah mengumpulkan dana dan menyerahkannya untuk dikelola oleh perusahaan, yang nantinya akan digunakan untuk membantu meringankan beban nasabah lain yang tertimpa risiko. Dana yang perusahaan donasikan tersebut merupakan hasil investasi bersama yang dilakukan berdasarkan perjanjian dengan risiko yang jelas.

Dengan demikian, melalui pengelolaan dana asuransi syariah yang didasarkan pada kerja sama, tanggung jawab, dan saling tolong menolong, pemegang polis asuransi syariah dari AXA Financial Indonesia bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki perlindungan asuransi jiwa yang menyeluruh, sekaligus mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan untuk menyempurnakan ibadah melalui wakaf.

"Produk asuransi unit link berbasis syariah oleh AXA Financial Indonesia ini merupakan perpaduan yang komprehensif antara investasi dan proteksi jiwa, sehingga perusahaan percaya produk tersebut akan mendorong lebih banyak masyarakat terlindungi oleh asuransi dengan rasa lebih nyaman," katanya.

Menurutnya, sejak diluncurkannya fitur Wakaf pada tahun 2019, AXA Financial Indonesia mengembangkan inisiatifnya dengan memberikan sosialisasi wakaf melalui asuransi syariah kepada beberapa penggerak wakaf dari lembaga/organisasi Muslim di Indonesia seperti MUI, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kalisa IPB. Sosialisasi ini bertujuan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dalam meningkatkan pemahaman bahwa berwakaf dapat dilakukan sejak muda dan dengan cara yang mudah.

Asuransi merupakan komponen penting dalam perencanaan keuangan, baik untuk pribadi maupun keluarga. Namun seperti yang kita ketahui, banyak orang sekedar memahami asuransi sebagai proteksi terhadap risiko-risiko tak terduga dalam hidup mereka. Hal tersebut terukur pada survei Nielsen dalam laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tahun 2020 bahwa persentase kesadaran masyarakat akan memiliki produk asuransi jiwa sebesar 24%.

Cicilia menyebut, AXA Financial Indonesia akan terus bekerja sama bersama dengan berbagai pihak dalam mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia melalui asuransi syariah. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memang tidak dipungkiri memiliki potensi keuangan syariah yang begitu besar.

Per tahun 2020, data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2020) melaporkan bahwa asuransi syariah berkontribusi sebesar 84,39% dengan total aset kelolaan sebesar 80,98%. Sementara tingkat penetrasi asuransi syariah masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai 1% (data OJK per Juli 2020). Hal tersebut menunjukkan masih besarnya kesempatan bagi pelaku usaha, terlebih bagi perusahaan asuransi untuk turut menggarap dan berkontribusi dalam pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2021 mendatang.

4. **Astra Life Cetak Premi Bruto Rp 3,8 Triliun**
Neraca.co.id 27-04-2021

Astra Life Cetak Premi Bruto Rp 3,8 Triliun

Oleh: **Ahmad Nabhani** Selasa, 27/04/2021



NERACA

Jakarta – Meski dihadapkan pandemi Covid-19, kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa Astra atau Astra Life masih positif. Dimana perseroan berhasil membukukan premi bruto Rp3,8 triliun sepanjang 2020 diiringi kenaikan jumlah tertanggung. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Kata Presiden Direktur Astra Life, Windawati Tjahjadi, capaian yang diraih itu melebihi rata-rata kinerja industri asuransi jiwa. Dimana perolehan premi bruto atau gross written premium (GWP) 2020 itu tumbuh 11% (year-on-year/yoy) dari sebelumnya berkisar Rp3,4 triliun. "Pencapaian Astra Life pada tahun keenam sejak beroperasi itu berada di atas rata-rata kinerja industri asuransi jiwa pada 2020," ungkapnya.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pendapatan premi industri asuransi jiwa pada 2020 senilai Rp187,6 triliun mengalami penurunan 5% (yoy) dari 2019 senilai Rp196,7 triliun. Windawati menjelaskan bahwa pihaknya masih dapat mencatatkan pertumbuhan di tengah koreksi yang terjadi di industri. Astra Life pun pada 2020 mencatatkan jumlah tertanggung 2,9 juta jiwa atau naik 32% (yoy) dibandingkan dengan 2019 sekitar 2,2 juta jiwa.

Adapun, secara industri, total tertanggung turun mengalami penurunan 7% (yoy) dari 68,51 juta jiwa pada 2019 menjadi 63,69 juta jiwa pada 2020. "Secara finansial Astra Life tetap mencatat pertumbuhan premi 11 persen atau sebesar Rp3,8 triliun dan mencapai angka tertanggung 2,9 juta. Kami berterima kasih atas kepercayaan nasabah kepada Astra Life selama ini dan kami akan terus berinovasi dan fokus pada komitmen Astra Life untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi nasabah," ujar Windawati.

Dia menjelaskan bahwa 2020 merupakan tahun yang menantang bagi semua industri, tidak terkecuali industri asuransi jiwa. Namun, pada tahun lalu pihaknya dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim senilai Rp50,4 miliar kepada para nasabah. Windawati pun menjelaskan bahwa keuangan perusahaan ada dalam kondisi yang sehat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau risk based capital (RBC) di angka 454%. Nilainya jauh di atas batas yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 120%. "Astra Life optimis akan terus mencapai ketinggian baru pada tahun-tahun mendatang melalui digitalisasi yang menjadi strategi utama untuk akselerasi pertumbuhan bisnis ke depannya. Terlebih saat ini Astra Life berada di bawah naungan penuh grup Astra yang juga fokus mengembangkan bisnisnya di era digital," ujar Windawati.

5. **Di bawah Tekanan Pandemi, Astra Life Berhasil Bukukan Premi Rp3,8 Triliun**
[Wartaekonomi.co.id /27-04-2021](https://www.wartaekonomi.co.id/27-04-2021)

Di bawah Tekanan Pandemi, Astra Life Berhasil Bukukan Premi Rp3,8 Triliun

Selasa, 27 April 2021, 15:10 WIB



Kredit Foto: WE

WE Online, Jakarta - PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) berhasil mencatatkan *Gross Written Premium* (GWP) di tahun 2020 sebesar Rp3,8 triliun atau tumbuh 11% dan jumlah tertanggung yang melampaui angka 2,9 juta atau naik 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian Astra Life di tahun keenam sejak beroperasi ini berada di atas rata-rata pencapaian industri asuransi jiwa di tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi semua industri tidak terkecuali industri asuransi jiwa dimana berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) secara pendapatan premi industri asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar 5% dari Rp196,7 triliun di kuartal IV 2019 menjadi Rp187,6 triliun di kuartal IV 2020 dan total tertanggung turun 7% dari 68,51 juta menjadi 63,69 juta.

Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi mengungkapkan bahwa dengan segala tantangan yang ada, Astra Life tetap bisa membukukan pencapaian yang positif. "Secara finansial Astra Life tetap mencatat pertumbuhan premi 11% atau sebesar Rp3,8 Triliun dan mencapai angka tertanggung 2,9 juta. Kami berterima kasih atas kepercayaan nasabah kepada Astra Life selama ini dan kami akan terus berinovasi dan fokus pada komitmen Astra Life untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi nasabah."

Lebih lanjut ia mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan Astra Life atau Life Lovers dalam memberikan kontribusi terbaiknya ditengah keterbatasan yang ada akibat pandemi.

Sepanjang tahun 2020 Astra Life telah membayarkan klaim sebesar Rp504 miliar sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Astra Life untuk selalu hadir memberikan perlindungan bagi nasabah. Hal ini juga menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan rasio kecukupan modal/Risk Based Capital di angka 454%, jauh diatas batas yang ditentukan oleh OJK yaitu 120%.

Windawati optimis akan terus mencapai ketinggian baru di tahun-tahun mendatang melalui digitalisasi yang menjadi strategi utama untuk akselerasi pertumbuhan bisnis kedepannya. Terlebih saat ini Astra Life berada dibawah naungan penuh grup Astra yang juga fokus mengembangkan bisnis nya di era digital.

"Kami yakin dengan digital semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses dan memperoleh produk perlindungan, dan misi perusahaan untuk membawa ketenangan pikiran dan membangun masa depan yang sejahtera ke jutaan masyarakat Indonesia dapat terwujud," pungkasnya.

Penulis: **Sufri Yuliardi**

AXA Financial Indonesia Genjot Asuransi Syariah Lewat Fitur Wakaf

JAKARTA – PT AXA Financial Indonesia terus menggenjot lini bisnis syariahnya. Perseroan meyakini fitur wakaf yang telah dihadirkan sejak tahun 2019 mampu mendorong lini bisnis tersebut pada masa mendatang.

Direktur AXA Financial Indonesia Cicilia Nina menyampaikan, banyak pihak masih mempunyai pemahaman yang keliru terkait produk asuransi syariah. Oleh karena itu, perlu bagi AXA Financial terus melakukan edukasi dan sosialisasi konsep dan manfaat atas asuransi syariah.

“Strategi yang ada di AXA Syariah ini digenjut manajemen bahwa kami mau *expand* dan *extend* syariah melalui wakaf yang bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti MUI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kalisa IPB. Kami membuka diri dan melakukan pendekatan khusus kepada lembaga wakaf bahwa AXA Mandiri punya kendaraan untuk mendorong kinerja wakaf,” kata Cicilia

melalui webinar Selasa (27/4).

Dia menuturkan, asuransi berbasis syariah memiliki keistimewaan seperti prinsip berbagi risiko, saling tolong menolong, serta pengelolaan kontribusi peserta secara adil dan transparan. Instrumen pengelolaan dana pada produk asuransi syariah juga dikelola sebaik mungkin oleh perusahaan, berdasarkan perjanjian risiko yang jelas.

Dengan demikian, melalui pengelolaan dana asuransi syariah yang didasarkan pada kerja sama, tanggung jawab, dan saling tolong menolong, pemegang polis asuransi syariah bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki perlindungan asuransi jiwa yang menyeluruh. Sekaligus mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan untuk menyempurnakan ibadah melalui wakaf.

Head of Sharia AXA Financial Indonesia Rosyida Rivai menuturkan, asuransi merupakan komponen penting dalam perencanaan

keuangan, baik untuk pribadi maupun keluarga. Namun seperti yang diketahui, banyak orang sekadar memahami asuransi sebagai proteksi terhadap risiko-risiko tak terduga dalam hidup mereka.

Dia pun mengatakan, hal tersebut terukur pada survei Nielsen dalam laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tahun 2020 bahwa persentase kesadaran masyarakat akan memiliki produk asuransi jiwa sebesar 24%. Tantangan utamanya adalah edukasi yang lemah sehingga pola pikir terhadap asuransi sering diabaikan. Utamanya terkait bahwa asuransi syariah yang dikawinkan dengan fitur wakaf.

“AXA Financial Indonesia akan terus bekerja sama bersama dengan berbagai pihak dalam mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia melalui asuransi syariah. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memang tidak dipungkiri memiliki potensi keuangan

syariah yang begitu besar,” ujar dia.

Namun demikian, Rosyida mengakui, penetrasi asuransi syariah masih terjaga di kisaran 1%. Alih-alih pesimistis, perseroan meyakini bisa berlari kencang dengan pangsa pasar yang begitu besar di Indonesia. Kuncinya adalah edukasi dan literasi agar masyarakat, khususnya masyarakat muslim benar-benar paham konsep dan manfaat dari asuransi syariah.

Asuransi syariah tidak bertransaksi dan berinvestasi pada instrumen yang tidak jelas akadnya (*gharar*), spekulatif dan memiliki potensi merugikan salah satu pihak. Kemudian, prinsip asuransi syariah berdasar pada hukum Islam, oleh karena itu produk asuransi syariah tidak menginvestasikan dananya dalam bisnis yang mengandung *riba* (berbunga) dan hal lain yang diharamkan atau dihindari dalam Islam seperti alkohol, rokok, institusi keuangan konvensional dan bisnis lainnya yang masuk kategori nonhalal. (pri)

7. [Foto] Vaksinasi Industri Keuangan Non Bank
Kontan, hal. 10 / 28-04-2021

Vaksinasi Industri Keuangan Non Bank



KONTAN/Fransiskus Simbolon

Chief Technology Officer, Chief Financial & Investment Officer CAR Life, Antonius Probosanjoyo dan Chief Operating Officer CAR Life Insurance, dr. Sri Rahayu Sutanto melihat proses vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Jakarta, Selasa (27/4). PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR Life Insurance) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan vaksinasi Covid-19 untuk para lansia dalam program vaksinasi industri keuangan non-bank. Saat ini target pemerintah untuk vaksin lansia adalah 21,5 juta orang, tapi baru sekitar 11% target tercapai.

■ PENYELAMATAN JIWASRAYA

Ribuan Nasabah Jiwasraya Belum Mau Restrukturisasi

JAKARTA. Menjelang tenggat waktu akhir Mei 2021, restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya masih belum bisa tuntas sepenuhnya. Nasabah yang banyak belum setuju opsi dari restrukturisasi adalah adalah ritel.

Per 23 April 2021, progres restrukturisasi polis ritel Jiwasraya masih 74,8%. Itu berarti masih ada 45.021 nasabah ritel dari nasabah ritel seba-

nyak 179.253 belum mengikuti program restrukturisasi.

Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R. Mahelan Prabantarko mengungkapkan, pihaknya mengalami kesulitan untuk menjangkau nasabah di 74 cabang di Indonesia. Hal tersebut terkait alamat pengiriman surat nasabah yang tidak sesuai.

"Kami mengalami kesulitan

terkait surat yang dikirim ke nasabah banyak yang kembali dengan jumlah hingga ribuan. Upaya-upaya akan dilakukan untuk mencari alamat nasabah tersebut agar nanti pada 31 Mei dapat ter-kover dengan baik," ungkap Mahelan dalam webinar virtual, Selasa (27/4).

Ia juga bilang, nasabah yang pindah alamat dan mengetahui informasi restrukturisasi ini dapat langsung da-

tang ke kantor cabang terdekat untuk mengikuti program restrukturisasi.

Tak hanya nasabah dari ritel, polis yang berasal dari korporasi juga masih belum mencapai 100%. Berdasarkan data terakhir, baru 80,1% polis korporasi yang mengikuti program restrukturisasi.

Sedangkan polis yang berasal dari *bancassurance* sudah mencapai 92,7% dari total polis 17.459.

Mahelan mengungkapkan bahwa restrukturisasi ini merupakan upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh manajemen Jiwasraya. Meskipun demikian, ia menyadari, upaya tersebut tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Prinsipnya, kemampuan yang sudah kami lakukan itu maksimal. Harapannya kita bisa melakukan normalisasi karena kita juga tidak bisa memberi subsidi misalnya dengan memberi suku bunga mencapai 9% hingga 44%," ujar Mahelan.

Menjelang tenggat waktu restrukturisasi, mencuat masa-

lah baru, yakni penolakan skema restrukturisasi dari pensiunan perusahaan BUMN yang jadi nasabah di Jiwasraya.

Ada 12 dana pensiun BUMN yang menolak skema restrukturisasi ala jiwasraya. Para pensiunan menganggap usulan skema jiwasraya merugikan serta melanggar aturan soal manfaat dana pensiun yang didapatkan oleh pensiunan.

Jiwasraya punya alasan menawarkan opsi restrukturisasi. Alasannya untuk menekan kerugian serta menjaga keberlangsungan manfaat polis bagi 2,5 juta peserta dan nasabah jiwasraya.

Jika tidak segera dilakukan, ekuitas jiwasraya semakin memburuk karena liabilitas meningkat seiring berjalannya waktu. Hingga 2020, ekuitas jiwasraya sudah negatif Rp 38,64 triliun, sehingga rasio solvabilitas (RBC) pada posisi -1.000,3% jauh di bawah batas minimal aturan Otoritas Jasa Keuangan OJK sebesar 120%.

Adrianus Octaviano

RoboARMS Generali Indonesia Jaga Kinerja Investasi 97% Polis

JAKARTA – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) melalui layanan robot pengelola investasi RoboARMS berhasil menjaga kinerja *unit link* para nasabahnya. Hingga Maret 2021, sebanyak 97% dari polis yang mengaktifkan fitur RoboARMS disebut berhasil menjaga kinerja investasi di atas indeks harga saham gabungan (IHSG).

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sejak setahun lalu masih membawa dampak signifikan terhadap pergerakan harga saham di pasar modal. Pada akhir Januari 2021, IHSG ditutup melemah 1,41% atau turun 85,92 poin ke level 5.985,52.

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman menjelaskan, dengan pergolakan pasar tersebut, Generali Indonesia melalui inovasinya yakni RoboARMS masih terus setia menjaga dan mengelola porsi investasi pada *unit link*. Selain itu, layanan robot pengendali portofolio investasi juga menyesuaikan profil risiko nasabah.

Resmi diluncurkan sejak April 2019, RoboARMS bekerja mengelola *unit link* nasabah secara otomatis serta melakukan *adaptive action* dalam mencegah risiko terburuk. Sehingga selama pandemi, pemegang polis tak perlu khawatir karena investasinya dikelola dengan baik saat IHSG koreksi dan tetap *inline* saat pasar *rebound*.

Hadirnya Robo ARMS juga membantu nasabah dalam menangan-

langi tiga tantangan utama dalam mengelola investasi *unit link*. Di antaranya minimnya pengetahuan tentang investasi, tidak cukup waktu untuk memantau portofolio investasi, serta disiplin yang kuat untuk menyesuaikan strategi investasi dengan kondisi yang ada.

“Mengerti akan kesibukan dan kendala nasabah mengelola *unit link*, terlebih selama pandemi ini, Generali terus mengoptimalkan kinerja RoboARMS. Adanya #AutoKendali dari fitur RoboARMS tentu memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pemegang polis karena terbukti menunjukkan hasil yang baik di tengah pergerakan pasar,” ungkap Edy melalui siaran pers, Senin (26/4).

Generali berharap nasabah bisa memiliki perlindungan kesehatan serta finansial yang maksimal melalui *unit link* yang terkendali. Terutama di masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Edy menambahkan, RoboARMS memberikan kenyamanan dengan adanya fitur #AutoKendali bagi nasabah Generali yang memiliki produk *unit link*, berapapun nilainya. Untuk ke depan, Generali berharap RoboARMS semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia melalui produk *unit link* yang ada, untuk menjaga kinerja dan pada waktu yang sama memastikan proteksi nasabah. (pri)

10. [Foto] Vaksinasi INKB
Warta Kota, hal. 3 / 28-04-2021



Warta Kota/Henry Lopulalan, HO

VAKSINASI INKB — Allianz Indonesia bersama OJK dan Kementerian Kesehatan melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk industri keuangan nonbank (INKB) di kantor pusat Allianz Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa, (27/4). **Inset** : Presdir & CEO Manulife Indonesia (MI) Ryan Charland, Director & Chief Legal Compliance Officer MI Apriliani Siregar dan jajaran Manajemen Manulife mengamati pelaksanaan vaksinasi lansia tenaga pemasar INKB di Kantor Pusat Manulife Indonesia.

Manulife Indonesia Gelar Vaksinasi Covid-19

Selasa, 27 April 2021 | 18:40 WIB
Oleh : Ruht Semiono /



President Director and CEO Manulife Indonesia Ryan Charland bersama Director and Chief Legal Compliance Officer Manulife Indonesia Apriliani Siregar saat meninjau jalannya vaksinasi tenaga pemasar dan lansia di Jakarta, Selasa 27 April 2021. (Foto: BeritaSatu Photo)

President Director and CEO Manulife Indonesia Ryan Charland bersama Director and Chief Legal Compliance Officer Manulife Indonesia Apriliani Siregar saat meninjau jalannya vaksinasi tenaga pemasar dan lansia di Jakarta, Selasa 27 April 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Manulife Indonesia sebagai salah satu perwakilan perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan vaksin Covid-19. FOTO : BeritaSatu Photo

Manulife Indonesia Gelar Vaksinasi Covid-19 Untuk Lansia



Abdullah Azzam

27 April 2021 21:21 WIB



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Manulife Indonesia sebagai salah satu perwakilan perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan vaksin Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Manulife Indonesia sebagai salah satu perwakilan perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan vaksin Covid-19.

Oleh karenanya, sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Manulife Indonesia menggelar vaksin Covid-19 untuk lansia berusia minimal 60 tahun dan tenaga pemasar terpilih.

13. OJK-IKNB-Kemenkes Gelar Vaksinasi Covid-19 Khusus Lansia [Cnbcindonesia.com](https://cnbcindonesia.com) /27-04-2021

OJK-IKNB-Kemenkes Gelar Vaksinasi Covid-19 Khusus Lansia

TECH - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia | 27 April 2021 11:52

SHARE |  



Foto: Vaksinasi Industri Keuangan Non Bank untuk Lansia Indonesia (Tangkapan Layar Youtube OJK TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri keuangan non-bank melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk lansia, Selasa (27/4/2021). Vaksinasi dipusatkan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jakarta.

Selain itu, sejumlah perusahaan yang bergerak di industri keuangan non-bank seperti Manulife, CAR Life Insurance, Allianz, dan Prudential, juga melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk lansia di kantor masing-masing.

Saat memberikan keterangan pers, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan, vaksinasi ini merupakan bentuk kolaborasi riil antara OJK, industri keuangan non-bank, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Terima kasih pak menkes yang menjadikan sektor keuangan untuk distribusi vaksin. Kami yakin kalau kita lakukan serentak bisa deploy lebih banyak lagi, tunggu kapan gongnya, kita siapin," ujarnya.

Wimboh menyebut banyak masyarakat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan telah memiliki rekening bank. Mereka dapat menjadi sasaran vaksinasi ke depan.

"Tinggal pak menteri kapan perlu berapa kita lakukan, bahkan bisa serentak supaya cepat semua, melalui sektor jasa keuangan. Nanti program khusus melalui hub, bukan hanya pegawai, tapi juga nasabah," kata Wimboh.

"Nasabah sektor keuangan nanti sehat semua, bisnis jalan semua, sektor keuangan jadi untung semua. Terima kasih," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan terima kasih atas inisiatif OJK dan industri jasa keuangan non-bank. BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, bilang kalau mulai Juli nanti pemerintah akan mulai menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada semua kelompok masyarakat.

"Allianz punya branches everywhere di Indonesia. Bikin sentra vaksinasi di semua perusahaan bapak ibu, undang agen bapak ibu, biar sekarang untuk akselerasi vaksinasi. Jadi ada tambahan asuransi plus vaksin. Saya berharap di Juli kita akan vaksinasi sekitar 200 juta akan divaksinasi dan akan kita selesaikan dalam enam bulan," ujarnya.

"Saya percaya tidak kita lakukan ini eksklusif, tapi harus inklusif, semua komponen bangsa gunakan semua capital (modal) yang kita punya untuk mengatasi pandemi ini. Kita lebih kencang lagi bulan Juli nanti kita atasi pandemi bersama-sama," lanjutnya.

Secara total, BGS bilang pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 181,5 juta orang. Apabila dikalikan dua, maka diperlukan 363 juta suntikan.

"Bapak presiden minta dalam setahun. Kenyataannya keterbatasan di jumlah vaksin. Yang tersedia Juni, dari 363 juta, baru 110 juta-120 juta, dengan segala dinamika, akan turun 90 juta-100 juta sampai Juni. Artinya, sisanya mengejar 263 juta akan masuk dari Juli sampai Desember, 263 juta bagi 180 hari suntiknya, mungkin melakukan 1,4 juta-1,6 juta sehari, sekarang baru 500 ribu," kata BGS.

"Saya rasa, yang bisa membantu menyelesaikan salah satunya industri keuangan, cabangnya banyak, staf dan customer banyak. Jadi, saya ucapkan terima kasih dan minta tolong mohon dukungan. Kalau sekarang sentranya baru ada empat, masing-masing provinsi 34 kali empat. Mohon terus dukungannya di semester kedua tahun ini," lanjut eks wamen BUMN itu.

14. Siasat Baru Menkes Suntik Vaksin Covid ke 181 Juta Warga RI
[Cnbcindonesia.com](https://cnbcindonesia.com) /27-04-2021

Siasat Baru Menkes Suntik Vaksin Covid ke 181 Juta Warga RI

TECH - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia | 27 April 2021 13:49

SHARE |  



Foto: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat Konferensi Pers Perpanjangan dan Perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. (Tangkapan Layar)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih optimistis bisa ▶ menyuntikkan vaksin Covid-19 pada 181,5 juta penduduk Indonesia dalam satu tahun.

Menurut Budi Gunadi, dosis vaksin yang dibutuhkan untuk memvaksin 181,5 juta warga, dibutuhkan sebanyak 363 juta dosis vaksin. Dia pun menargetkan, vaksinasi ini selesai dalam waktu 6 bulan ke depan dengan rata-rata suntik per hari 1,4 juta orang sampai dengan 1,6 juta orang.

"Sekarang baru 500 ribu orang yang disuntik per hari," kata Menkes Budi Sadikin, Selasa (27/4/2021).

Budi juga menyebut sejumlah tantangan pasokan vaksin yang saat ini cukup terbatas karena menjadi rebutan hampir semua negara. Indonesia baru mengantongi 110-120 juta dosis vaksin sampai dengan Juni ini.

"Artinya, sisanya mengejar 263 juta akan masuk dari Juli sampai Desember, 263 juta bagi 180 hari suntiknya, mungkin melakukan 1,4-1,6 juta sehari," kata Budi Sadikin menambahkan.

Dia menambahkan, untuk meningkatkan jumlah orang yang disuntik vaksin setiap harinya perlu melibatkan berbagai kalangan, termasuk pelaku di sektor jasa keuangan.

Misalnya, perusahaan asuransi memiliki banyak cabang di berbagai daerah di Indonesia dan mempunyai banyak agen. Ia pun mendorong agak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memfasilitasi semakin banyak perusahaan asuransi yang terlibat dalam sentra vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Untuk hari ini misalnya, OJK bersama industri keuangan non-bank melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk lansia yang dipusatkan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jakarta.

Selain itu, sejumlah perusahaan yang bergerak di industri keuangan non-bank seperti Manulife, CAR Life Insurance, Allianz, dan Prudential, juga melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk lansia di kantor masing-masing.

"Bikin sentra vaksinasi di semua perusahaan bapak ibu, undang agen bapak ibu, biar sekarang untuk akselerasi vaksinasi. Jadi ada tambahan, asuransi plus vaksin," katanya.

15. Allianz Indonesia Turut Andil Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19 Industri Keuangan Nonbank bersama OJK
[Kompas.id /27-04-2021](https://kompas.id/27-04-2021)

Allianz Indonesia Turut Andil Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19 Industri Keuangan Nonbank bersama OJK

27 April 2021 21:59 WIB



Untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau *herd immunity* dan mempercepat vaksinasi, pemerintah menggalas program vaksinasi dengan sejumlah industri, termasuk institusi keuangan.

Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kesehatan serta Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Allianz Indonesia bersama perusahaan-perusahaan asuransi mendukung Program Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh asosiasi-asosiasi Industri Keuangan Non-Bank.



Karin Zulkarnaen, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia bersama peserta vaksinasi Covid-19 Industri Keuangan Non-Bank yang diselenggarakan bersama OJK dan Kementerian Kesehatan di kantor pusat Allianz Indonesia.

Program yang diadakan di Hotel Bidakara - Jakarta dan Kantor Pusat Allianz Indonesia di Jakarta ini menyediakan vaksin Covid-19 untuk lansia (60 tahun ke atas) dan karyawan garda depan perusahaan asuransi. Melalui program ini, Allianz Indonesia mendukung pemerintah dalam mencapai target 181,5 juta vaksinasi sekaligus mendukung industri asuransi untuk terus memberikan pelayanan prima dan aman kepada nasabah.

Keikutsertaan Allianz Indonesia dalam program ini melengkapi rangkaian vaksinasi lansia yang telah dilakukan melalui kampanye #AwaliDenganKebaikan di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya sejak Maret lalu.



Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, turut hadir mendukung kesuksesan acara dari Hotel Bidakara secara virtual yang disambut baik oleh Karin Zulkarnaen, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia di sentra vaksinasi di kantor pusat Allianz Indonesia.

"Rangkaian inisiatif ini menunjukkan komitmen kami kepada masyarakat dan dukungan berkelanjutan kami terhadap upaya pemerintah dalam percepatan program vaksinasi. Kami berharap program ini dapat membantu mengurangi penyebaran virus. Sesuai dengan prinsip kami sebagai perusahaan asuransi, kami selalu ingin melindungi nasabah, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan, terutama pada saat-saat sulit seperti pandemi ini," kata Joos Louwerier, Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia.



Para peserta menjalani observasi untuk memastikan tidak ada gejala yang muncul pasca vaksinasi. Bersama OJK dan Kementerian Kesehatan, Allianz Indonesia mendukung vaksinasi Industri Keuangan Non-Bank untuk lansia dan karyawan garda terdepan (frontliners) (27/04/2021).

Melalui kampanye #AwaliDenganKebaikan, Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Syariah) bekerja sama dengan Halodoc dan Gojek Indonesia menyediakan Pos Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Drive Thru gratis untuk para lansia di lima kota terpilih sejak 17 Maret 2021.

Pada awal pandemi tahun 2020, Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli berkolaborasi dengan Halodoc menggelar *drive thru rapid test* untuk warga di zona merah DKI Jakarta sebagai langkah awal pembatasan penyebaran virus.



Susana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Allianz Indonesia bersama OJK, Kementerian Kesehatan dan DAI di kantor pusat Allianz Indonesia (27/04/2021).

Selain itu, Allianz Indonesia menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk membantu nasabah mengatasi dampak Covid-19 melalui program Allianz Smart Point, yaitu nasabah dapat menukarkan poinnya untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan melakukan tes *swab* antigen *drive-thru*.
[*]

16. Selesaikan Gagal Bayar Asuransi, Restrukturisasi Dinilai Jadi Solusi Terbaik
[Liputan6.com](https://liputan6.com) /27-04-2021

Selesaikan Gagal Bayar Asuransi, Restrukturisasi Dinilai Jadi Solusi Terbaik



Andina Librianty

27 Apr 2021, 19:15 WIB



Share
18



Seorang wanita berjalan dekat karangan bunga di halaman Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Jakarta, Selasa (15/12/2020). Karangan bunga tersebut berisi ucapan dukungan kepada manajemen baru Jiwasraya dalam penyelamatan polis melalui program restrukturisasi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

[Liputan6.com](https://liputan6.com), Jakarta Pengamat Asuransi, Kapler A Marpaung menilai program restrukturisasi polis PT Asuransi **Jiwasraya** (Persero) menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi gagal bayar di perusahaan **asuransi**.

Kapler menyebutkan, penyelamatan perusahaan asuransi melalui program restrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Mengacu aturan itu, kata Kapler, selama kondisi keuangan mengalami tekanan, maka perusahaan dalam hal ini pemegang saham wajib melakukan restrukturisasi. Seperti contohnya yang saat ini adalah Jiwasraya.

"Dalam restrukturisasi misalnya, Jiwasraya memohon untuk meminta diskon pengembalian kepada nasabah. Apakah dana pemegang polis dilakukan secara dicicil dan mendapatkan persetujuan, itu sah sah saja. Memang ini kondisi yang berat, tapi ini menjadi jalan keluar," teranginya dalam acara Dialog Bisnis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Industri Asuransi, pada Selasa (27/4/2021).

Seperti yang diketahui, masalah yang terjadi di Jiwasraya terjadi karena adanya pembiaran dan mismanajemen yang terjad sejak tahun 2008. Dalam kondisi keuangan yang sedang sulit, saat itu Jiwasraya menawarkan produk asuransi yakni JS Saving Plan dengan imbal hasil pasti yang tinggi. Misalnya untuk Bancassurance mencapai sebesar 9 persen hingga 13 persen. Selain Saving Plan, bunga yang sangat tinggi juga dijanjikan kepada produk asuransi tradisional atau ritel dengan bunga mencapai 14 persen.

Dia melihat, masalah yang terjadi di industri **asuransi** nasional tidak hanya Jiwasraya. Melainkan ada juga PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Wanaartha Life, Kresna Life hingga PT Asabri (Persero). Ia berharap, seluruh praktisi perasuransian ikut andil menyelesaikan persoalan di industri ini.

"Bukan tidak mungkin kalau kita biarkan masalahnya akan lebih besar lagi. Mari kita bersama-sama membantu otortitas untuk membenahi industri ini supaya menjadi lebih sehat dan kuat di masa mendatang," ungkapnya.

17. OJK Disarankan Segera Bentuk Lembaga Penjamin Polis Republika.co.id /27-04-2021

Home > Ekonomi > Ekonomi

OJK Disarankan Segera Bentuk Lembaga Penjamin Polis

Selasa 27 Apr 2021 19:51 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya



Asuransi (ilustrasi)

Foto: wepridefest.com

Industri asuransi nasional tengah menghadapi krisis kepercayaan karena banyak kasus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) pada tahun ini. Kehadiran lembaga ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi yang tengah menjadi sorotan karena berbagai masalah.

Hal ini mengingat industri asuransi nasional tengah menghadapi krisis kepercayaan karena banyaknya kasus yang muncul. Mulai dari AJB Bumiputera, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha, dan yang terbaru PT Asuransi Jiwa Kresna.

Pengamat Asuransi Kapler A Marpaung mengatakan LPP seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada industri perbankan. Adapun tujuannya agar jaminan perlindungan pada tertanggung atau pemegang polis asuransi.

"Lembaga Penjamin Polis saat ini sangat momentumnya tepat. Saya sebagai pelaku asuransi merasa tidak nyaman, jangan-jangan masyarakat anggap kami insan asuransi sudah membohongi," ujarnya saat acara dialog Penerapan GCG Industri Asuransi secara virtual, Selasa (27/4).

Menurut dia seharusnya LPP sudah dibangun pada 2017 jika mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebab, diamanatkan, setelah tiga tahun UU itu diberlakukan, lembaga ini harus berdiri.

"Mungkin karena merasa sudah ada yang melindungi, maka dia melakukan fraud. Saya kira ini alasan yang oke, hanya menurut saya jangan menjadi pertimbangan utama. Toh yang dijamin LPP pasti terbatas sebagaimana LPS berikan batas tanggung jawabnya kalau ada bank gagal bayar," lanjutnya.

Kapler menyebut adanya LPP akan menjadi mitra yang baik untuk OJK untuk mengawasi industri perasuransian. Dia berharap lembaga ini dibangun pemerintah tahun ini meskipun ada kekurangan, bisa diperbaiki sambil berjalan seperti halnya LPS yang tidak langsung mulus.

"Karena itu sangat urgent (mendesak) sebab bisa bangun kembali kepercayaan industri asuransi, paling tidak pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar. Ini adanya di OJK, mungkin tahun ini kita harus mendirikan lembaga penjamin polis. Masalah nanti ada kekurangan, nanti bisa dibenahi sambil berjalan," ucapnya.

Sementara Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R Mahelan Prabantariko menambahkan industri perbankan dan asuransi memiliki risiko tinggi karena mengelola dana masyarakat dan berhubungan dengan investasi.

Menurutnya ada sejumlah kebijakan OJK yang longgar terhadap industri asuransi, beda dengan industri perbankan yang lebih ketat. Namun OJK sudah mulai melakukan upaya baik terhadap industri perasuransian dengan mengeluarkan sejumlah produk hukum sudah baik, salah satunya mengeluarkan aturan tingkat kesehatan perusahaan asuransi seperti perbankan.

"Bedanya di sini tidak ada LPP seperti LPS. Risiko perbankan dan asuransi sama-sama cukup tinggi. Bedanya perbankan itu sistem intermediasi, asuransi itu proteksi. Jangan sampai asuransi menjadi lembaga intermediasi. Ini kurang pas," ucapnya.

18. Pemegang Polis Jiwasraya Ikut Restrukturisasi Mencapai 93 Persen
[Tribunnews.com](https://tribunnews.com) /27-04-2021

Pemegang Polis Jiwasraya Ikut Restrukturisasi Mencapai 93 Persen

Selasa, 27 April 2021 21:27 WIB



Asuransi Jiwasraya

KONTAN... Kontan/Carolus Agus Waluyo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi **Jiwasraya** (Persero) mencatat, jumlah pemegang polis yang ikut dalam program restrukturisasi terus mengalami pertumbuhan.

Sampai pada 27 April 2021, pemegang polis Bancassurance yang ikut dalam restrukturisasi mencapai 93 persen atau 16.192 polis.

Sementara itu, pemegang polis Korporasi yang ikut restrukturisasi mencapai 80,1 persen atau 1.638 polis. Di sisi lain, pemegang polis ritel sudah mencapai 74,8 persen atau 134.232 polis.

Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi **Jiwasraya** sekaligus Direktur Kepatuhan dan SDM **Jiwasraya**, R. Mahelan Prabantarikso menyampaikan, pihaknya terus mengupayakan agar pemegang polis bisa mengikuti program restrukturisasi ini.

"Sejauh ini, program restrukturisasi mendapatkan respon positif, hal itu terbukti dengan terus bertambahnya jumlah pemegang polis yang ikut restrukturisasi. Kita menargetkan restrukturisasi ini bisa selesai pada 31 Mei 2021," kata Mahelan dalam acara Dialog Bisnis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Industri Asuransi, Selasa (27/4/2021).

Pada dasarnya, kata Mahelan, program restrukturisasi bukanlah program paksaan bagi pemegang polis.

Program ini diciptakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada pemegang polis apabila **Jiwasraya** dilikuidasi atau dipailitkan.

Pihaknya pun menghormati pemegang polis yang tidak ikut dalam restrukturisasi. Yang jelas, bagi pemegang polis yang tidak ikut akan tertinggal di **Jiwasraya**, di mana nantinya, izin operasional **Jiwasraya** akan dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Nanti **Jiwasraya** tetap berdiri tetapi bukan sebagai perusahaan asuransi. Pemegang polis akan ditinggal bersama dengan aset-aset **Jiwasraya** yang unclear dan unclean. Yang kemudian, pemegang polis dan perusahaan **Jiwasraya** akan menjadi utang piutang," ungkapnya.

Program restrukturisasi merupakan upaya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham **Jiwasraya**.

Program restrukturisasi mengacu pada Undang-Undang 40 Nomor 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 71 Nomor 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Tags **Jiwasraya** **restrukturisasi polis nasabah**
R Mahelan Prabantarikso

| RESTRUKTURISASI BUMN |

Holding Asuransi Berikan Nilai Lebih

Bisnis, JAKARTA — Keberadaan perusahaan induk atau *holding* asuransi BUMN dinilai akan memberikan nilai lebih, karena dapat melaksanakan program strategis secara terintegrasi.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan bahwa keberadaan *holding* asuransi BUMN akan meningkatkan profit konsolidasi, karena mampu mengintegrasikan sejumlah langkah strategis.

“Misalnya dalam merampingkan *cost structure* dengan meminimalisir biaya yang bersifat duplikasi antar anak perusahaan. Jangka pendek mungkin *revenue* konsolidasi belum naik signifikan, tapi struktur biaya bisa lebih ramping, sehingga *bottom line* profit konsolidasi bisa meningkat,” katanya di Jakarta, Selasa (27/4).

Toto Pranoto berpendapat, upaya restrukturisasi akan menghasilkan kondisi perusahaan yang lebih sehat jika dilaksanakan dengan konsisten. Penanganan persoalan Jiwasraya dengan mengalihkan pengelolaan nasabah ke IFG Life juga akan lebih prospektif dengan kehadiran *holding* asuransi BUMN.

Indonesia Financial Group (IFG) sendiri memastikan perusahaan asuransi BUMN akan dikelola secara lebih baik dengan mengedepankan manajemen risiko, GCG, dan memperkuat analisis berbasis data.

Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga berharap transformasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pihaknya secara terus menerus akan menjadi dasar kuat bagi perusahaan asuransi pelat merah.

Pantro menuturkan, pada industri

asuransi dikenal dua jenis asuransi yakni asuransi jiwa dan umum. Pada asuransi jiwa, pemerintah telah menghadirkan IFG Life yang nanti akan mengambil alih polis Jiwasraya.

“Nanti akan *take over* dengan penguatan modal dari pemerintah, sehingga harus kuat ketika ambil portofolio Jiwasraya yang direstrukturisasi. Kabar baiknya, yang mau direstrukturisasi sekitar 75% sudah setuju,” ujarnya.

Pantro melanjutkan, untuk asuransi umum, IFG memberikan penekanan pada tata kelola risiko yang baik dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola keuangan seperti pada sektor perbankan. Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu yang terus diupayakan.

Penguatan pada asuransi umum, katanya, lebih pada mencari keseimbangan antara liabilitas dan aset. Perusahaan asuransi harus bisa memastikan risiko yang ditanggung bisa dikelola dengan baik.

Dia mencontohkan, jika pada masa lalu terjadi persaingan premi yang tidak sehat termasuk antara asuransi BUMN, ke depan penentuan premi akan dilakukan dengan data analisis. IFG, tegasnya, tidak akan mengatur harga, tetapi memastikan harga yang ditetapkan berdasarkan analisis data yang matang.

Dari sisi aset, pola investasi yang dilakukan akan sangat konservatif dengan *liability driven investment* (LDI) alias skema investasi yang berorientasi kepada pemenuhan liabilitas, bukan pada optimalisasi *return*.

20. Tata Kelola Industri Asuransi Harus Diperkuat Bisnis Indonesia, hal. 12 / 28-04-2021

| TANTANGAN BISNIS |

Tata Kelola Industri Asuransi Harus Diperkuat

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan kepada perusahaan asuransi agar terus menjaga standar layanan dan tata kelola yang baik atau *good corporate governance*.

Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Supriyono mengatakan bahwa isu tata kelola perusahaan yang baik menemukan relevansinya saat ini karena dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha menghadapi guncangan hebat.

Bagi industri asuransi, isu tata kelola menjadi sorotan karena adanya sejumlah perusahaan yang mengalami gagal bayar. Isu tersebut mendapat perhatian besar di tengah pandemi, saat daya beli masyarakat menurun dan kinerja investasi terkoreksi, sehingga bisnis asuransi menghadapi tantangan.

"Pandemi Covid-19 ini menjadi bukti, hanya perusahaan yang memiliki GCG

[*good corporate governance*] dengan implementasi bagus yang mampu bertahan. Kita pun perlu meninjau ulang isu-isu fundamental, apa saja yang masih bolong-bolong untuk kita *improve* lagi," ujar Supriyono dalam dialog *Penerapan GCG di Industri Asuransi* yang digelar *Bisnis Indonesia* pada Selasa (27/4).

Menurutnya, penguatan GCG menjadi hal penting bagi industri, khususnya untuk melindungi kepentingan investor dan pemegang polis.

Berbagai persoalan yang ada pun perlu diselesaikan sampai ke akarnya, yakni implementasi GCG.

Supriyono menjelaskan bahwa pembenahan GCG merupakan wewenang dari pengurus suatu perusahaan, sehingga diperlukan integritas yang kuat dari manajemen.

Hal itu pun dapat didukung oleh auditor eksternal dan komisaris independen yang mewakili kepentingan

pemegang polis.

Dia menekankan bahwa kecukupan struktur organisasi menjadi sangat penting, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sedang bermasalah. Keberadaan komisaris dan direksi bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban, tetapi harus benar-benar berfungsi.

Dalam pembenahannya, menurut OJK, manajemen perusahaan asuransi perlu fokus dalam aspek tata kelola investasi, manajemen risiko, pengendalian internal, hingga rencana strategis perusahaan. Selain itu, keterbukaan informasi dan hubungan dengan otoritas pun perlu diperkuat.

Kemudian, bergulirnya masalah gagal bayar dan mencuatnya keluhan nasabah asuransi dinilai sebagai momentum untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis atau LPP.

Keberadaan lembaga itu dinilai dapat membangun kepercayaan masyarakat

terhadap asuransi.

Dosen Program MM-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler A. Marpaung menjabarkan bahwa UU 40/2014 tentang Perasuransian mengamanatkan pembentukan LPP 3 tahun setelah aturan itu berlaku. Sehingga seharusnya LPP sudah ada pada 2017.

Selain sudah melewati amanat UU, Kapler menilai pembentukan LPP itu makin menemukan relevansinya dengan berbagai kejadian saat ini. Kasus gagal bayar yang menimpa sejumlah perusahaan dan adanya keluhan pemegang polis membuat lembaga itu perlu segera dibentuk.

"Pendirian LPP momentumnya saat ini sangat tepat. Saya sebagai praktisi ada merasa tidak nyaman, jangan-jangan masyarakat menganggap kami orang asuransi suka membohongi, Pak Kapler ini mungkin *duit*-nya pakai premi nasabah, ada rasa terganggu,"

ujar Kapler.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi perlu dijaga dengan baik, salah satunya dengan adanya jaminan keamanan. Oleh karena itu, dukungan para pelaku industri terhadap pembentukan LPP harus dapat berbuah realisasi.

Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Bidang Komunikasi dan Hukum R. Mahelan Prabantarikso pun menilai bahwa keberadaan LPP menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus seperti Jiwasraya.

Pencegahan itu perlu diiringi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Kalau di perbankan ada LPS, di sini [asuransi] tidak ada LPP. Mungkin ini menjadi suatu hal, topik yang patut didiskusikan," ujar Mahelan dalam kesempatan yang sama. (Wibi P. Pratama)

OJK: Tata Kelola Bermasalah Pemacu Kasus Asuransi

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tata kelola yang bermasalah menjadi pemacu terjadinya kasus-kasus pada sejumlah perusahaan asuransi. Regulator juga menyoroti optimalisasi peran pengawasan komisaris, independensi perusahaan dalam suatu konglomerasi, hingga transparansi dalam penerapan tata kelola yang baik.

Direktur Pengawasan Asuransi OJK Supriyono menyampaikan, tata kelola baik suatu perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) menemukan relevansinya ketika perusahaan menemui suatu krisis ketika pandemi Covid-19. Kondisi saat ini menjadi bukti bahwa perusahaan yang mampu bertahan adalah perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik.

"Kami meyakini peningkatan GCG dari pelaku bisnis demi kelangsungan usaha, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari keuntungan sesaat, akan berimbas pada ketahanan industri di berbagai situasi. Sebagai regulator OJK terus menyuarakan GCG, pada 2014 kami sudah terbitkan pengaturannya, kemudian sudah diperbarui. Terakhir, pada 2019 dilakukan perubahan dalam rangka merespon perkembangan," kata Supriyono pada webinar berjudul Penerapan GCG di Industri Asuransi, Selasa (27/4).

Supriyono mengungkapkan, ketentuan GCG diantaranya mengatur seperti penerapan kepengurusan perusahaan, pelaksanaan tugas, wewenang pengurus, adanya auditor eksternal, tata kelola investasi, dan rencana strategis perusahaan, keterbukaan informasi, dan hubungan

dengan *stakeholders*. Lebih jauh lagi, perihal etika juga sudah mulai disinggung dalam ketentuan GCG.

Untuk mempertegas bobot dalam GCG tersebut, OJK melalui POJK Nomor 28/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Jasa Keuangan Non-Bank, menempatkan tata kelola sebagai tolak ukur pertama. Setelah itu baru dilakukan penilaian terhadap profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan akses ke pendanaan.

"Tata kelola kami tempatkan nomor satu dalam asesmen tingkat kesehatan suatu perusahaan. Karena kami sudah banyak belajar dari permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini, karena akarnya memang sebagian besar kurangnya penerapan GCG. GCG ini memang tidak terlihat dari luar, GCG ini seperti akar, kalau kuat maka buah dan daunnya akan bagus. Meski beberapa daun akan gugur, kalau ada angin puyuh besar maka pohonnya akan tetap tumbuh dan bertunas kembali," papar Supriyono.

Lebih lanjut, dia menekankan sejumlah aspek lain agar penerapan GCG bisa lebih maksimal. Di antaranya adalah optimalisasi hubungan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Sebab, masih ada komisaris yang



Supriyono

kurang tepat memposisikan dirinya, sehingga peran komisaris menjadi kurang optimal.

"Fungsi dewan komisaris ini harus lebih dipertajam lagi. Tentu saja sebagai pengawas independen yang memantau direksi, apalagi saat menghadapi suatu krisis maupun ketika perusahaan dalam kondisi baik pun komisaris perlu memberikan pertanyaan kritis kepada direksi. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh direksi itu perlu ditanyakan. Komisaris seharusnya seperti itu," ucap dia.

Selain itu, Supriyono menuturkan, perusahaan-perusahaan asuransi sedang dalam era konglomerasi dan struktur grup usaha. Tentu saja transaksi internal antarperusahaan konglomerasi atau grup tidak bisa dihindari. Namun demikian, transaksi harus dilakukan secara wajar dan normal. Hal itu menjadi penting karena kembali menyangkut independensi direksi dan pengawasan dari komisaris.

"Struktur grup juga harus disusun sedemikian rupa untuk memberikan tingkat kemandirian perusahaan yang wajar. Jangan sampai dalam hal ini khususnya perusahaan asuransi, menjadi tidak bisa lagi mandiri. Ini sangat

penting," imbuh Supriyono.

Aspek Transparansi Perusahaan
Dia juga menerangkan, pentingnya pengawasan dari pihak eksternal lewat aspek transparansi perusahaan. Apalagi saat ini banyak dari pemegang polis dan investor gencar mencari informasi. Aspek transparansi itu akan lebih lanjut didorong dari implementasi PSAK 74 yang mampu membedah laporan keuangan perusahaan asuransi lebih detail.

Supriyono menegaskan, tujuan dari transparansi bisa dicapai jika ada laporan keuangan dan nonkeuangan yang komprehensif, tepat waktu, dan teratur. Sehingga regulator, investor, dan publik bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Manajemen perusahaan dan auditor eksternal harus memainkan peran penting untuk memastikan integritas dan kelengkapan informasi dari laporan tersebut.

"Komisaris, direksi, manajemen senior, akuntan, maupun auditor perusahaan tentu dapat mulai membuat perbedaan nyata dalam menjalankan perusahaan. Kemudian mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selanjutnya meningkatkan nilai bisnis perusahaan," ujar dia.

Supriyono pun mengungkapkan, industri asuransi masih mencatatkan suatu pencapaian meski mengalami turbulensi akibat pandemi. Aset dari 143 perusahaan asuransi komersial masih meningkat 1,73% secara *year on year* (yoy) per Januari 2021 menjadi Rp 747 triliun. Secara bulanan (*month to month*/mtm) aset juga masih naik 1,27%.

Pada saat yang sama, premi asuransi komersial meningkat menjadi Rp 30,35 triliun atau naik 15,94% (yoy). Klaim tumbuh moderat 4% (yoy) menjadi Rp 16,59 triliun. "Ini adalah gambaran industri asuransi masih bertahan di tengah pandemi dan tantangan meningkatnya klaim, serta diantara isu-isu negatif. Ini patut kita syukuri dan perlu didukung dengan meningkatkan GCG," tandas dia.

22. [Foto] GCG Industri Asuransi
Bisnis Indonesia, hal. 3 / 28-04-2021

■ GCG INDUSTRI ASURANSI



Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Tampilan layar menampilkan Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Supriyono (*kiri bawah*), pengamat asuransi dan Dosen MM-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Kapler A. Marpaung (*kanan bawah*), Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso (*kanan atas*) dan Wakil Pemimpin Redaksi *Bisnis Indonesia* Fahmi Achmad (*kiri atas*) saat webinar dengan tema *Penerapan Good Corporate Governance di Industri Asuransi* di Jakarta, Selasa (27/4). Webinar tersebut membahas mengenai langkah inovatif pelaku industri agar mampu bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan di tengah situasi yang menantang.